PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KESEMPATAN KERJA MELALUI INVESTASI DAN DAMPAKNYA PADA KAWASAN TIMUR DAN BARAT INDONESIA

Matius Irsan Kasau¹, Rahmat Laan²

¹Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi dpk pada STMIK Dipanegara Makassar,

²Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Kupang Nusa Tenggara Timur.

e-mails: matius.irsan@gmail.com, rahmatlaan@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Indonesia terdiri atas 34 provinsi dengan sentuhan pembangunan ekonomi, khususnya kesempatan kerja tidak merata pada seluruh wilayahnya. Menurut teori kausalitas atau teori dependensi, dapat diduga faktor-faktor ekonomi kunci dan utama seperti pengeluaran pemerintah dan investasi tidak memberikan pengaruh dan dampak yang merata terhadap pertumbuhan kesempatan kerja pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di KTI dan KBI baik langsung, tidak langsung maupun pengaruh secara total pada kedua wilayah. Data yang digunakan adalah data sekunder, kuantitatif berbentuk panel data dari 34 Provinsi periode tahun 2007 hingga tahun 2013 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dengan SEM (Structural Equation Modeling) dan software AMOS Versi 21.0 sebagai alat analisis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi dan Kesempatan Kerja baik langsung, tidak langsung maupun secara total. Demikian juga halnya pengaruh Investasi terhadap kesempatan Kerja baik di KTI maupun di KBI. Namun pengaruh di KTI lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh di KBI.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kesempatan Kerja, KTI dan KBI.

1. PENDAHULUAN

Kesempatan Kerja di Indonesia merupakan hal krusial, yang tidak pernah selaras dengan jumlah pencari kerja. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat, bahkan sekitar setengah juta tenaga kerja Indonesia mengalir ke luar negeri untuk mencari kerja dan penghidupan layak setiap tahun. Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Kata kunci untuk mengatasi pengangguran adalah pembukaan kesempatan kerja seluas luasnya, sementara pengeluaran pemerintah dan investasi merupakan jawaban untuk pembukaan kesempatan

kerja itu.

Indonesia merupakan satu satunya Negara di dunia yang memiliki wilayah pulau terbanyak dan wilayah laut terluas, kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia, aneka ragam suku, budaya, agama dan aspek sosial lainnya. Namun sejak merdeka pada tahun 1945 belum ada satu pemerintahan dari 7 Presiden yang mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan serta disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah dan ukuran ekonomi makro lainnya secara signifikan, bahkan setelah dibentuknya kementerian yang secara khusus menangani percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kondisi ini diperparah lagi oleh Negara tetangga dan berbagai

Negara lain yang menjanjikan pekerjaan dan penghidupan layak yang jauh diatas standar hidup di kampung halaman sendiri (Portal Nasional RI, 2012). Berdasarkan BNP2TKI (2013) data 10 negara sebagai program kerjasama G to G (Government to Government), tingkat kesejahteraan hidup di Indonesia berada pada posisi terendah, sekitar 2 kali di bawah Malaysia atau 14 kali di bawah Australia, bahkan masih lebih rendah dari Papua Nugini, Negara tetangga di sebelah Timur.

Faktor ekonomi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah besarnya porsi pengeluaran pemerintah, sebaran investasi dan pemerataan kesempatan kerja. Pada Tabel 1. disajikan data besarnya Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Kesempatan Kerja di Indonesia dalam kurun waktu mulai tahun 2001 hingga tahun 2014 (BPS Indonesia, 2014). Kondisi ini diperparah lagi oleh Negara tetangga dan berbagai Negara lain

yang menjanjikan pekerjaan dan penghidupan layak yang jauh diatas standar hidup di kampung halaman sendiri (Portal Nasional RI, 2012). Berdasarkan BNP2TKI (2013) data 10 negara sebagai program kerjasama G to G (Government to Government), tingkat kesejahteraan hidup di Indonesia berada pada posisi terendah, sekitar 2 kali di bawah Malaysia atau 14 kali di bawah Australia, bahkan masih lebih rendah dari Papua Nugini, Negara tetangga di sebelah Timur.

Faktor ekonomi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah besarnya porsi pengeluaran pemerintah, sebaran investasi dan pemerataan kesempatan kerja. Pada Tabel 1. disajikan data besarnya Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Kesempatan Kerja di Indonesia dalam kurun waktu mulai tahun 2001 hingga tahun 2014 (BPS Indonesia, 2014).

Tabel 1
Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kesempatan Kerja dan Pertumbuhannya di Indonesia dari tahun 2001-2014

Tahun	Pengel. Pemerintah (Miliar Rp.)	Kenaikan (%)	Investasi (Miliar Rp.)	Kenaikan (%)	Kesempatan Kerja (Orang)	Kenaikan (%)
2001	97.646	-	293.793	-	83.729.256	-
2002	110.334	12,9	307.585	4,7	85.320.112	1,9
2003	121.404	10,1	309.431	0,6	87.367.795	2,4
2004	126.249	3,9	354.561	14,6	89.289.886	2,2
2005	134.626	6,6	393.501	10,9	92.415.032	3,5
2006	147.564	9,6	403.719	2,6	95.177.102	3,0
2007	153.310	3,9	441.362	9,3	97.583.141	2,5
2008	169.297	10,4	493.822	11,9	102.049.857	4,6
2009	195.834	15,7	510.100	3,3	104.485.444	2,4
2010	196.399	0,3	553.443	8,5	107.405.572	2,8
2011	219.574	11,8	567.279	2,5	111.281.744	3,6
2012	240.873	9,7	622.305	9,7	112.802.805	1,4
2013	258.938	7,5	655.910	5,4	114.021.189	1,1
2014	264.894	2,3	687.393	4,8	115.959.549	1,7

Sumber: Booklet BPS Indonesia 2014.

Berdasarkan data dalam Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Kesempatan Kerja tampak tidak bertumbuh searah, misalnya dari tahun 2006 ke tahun 2007 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah turun dari 9,6 persen ke 3,9 persen. Penurunan ini menyebabkan Investasi malah bertumbuh dari 2,6 persen ke 9,3 persen. Sementara Kesempatan Kerja menurun dari 3,0 persen ke 2,5 persen. Berbeda kondisi dari tahun 2007 ke tahun 2008 yang Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah naik dari 3,9 persen ke 10,4 persen, sementara Investasi dan Kesempatan Kerja justru juga naik masing masing dari 9,3 persen ke 11,9 persen dan dari 2,5 persen ke 4,6 persen. Selanjutnya, dari tahun 2008 ke tahun 2009

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah berlanjut naik dari 10,4 persen ke 15,7 persen, tetapi Investasi dan Kesempatan Kerja justru mengalami penurunan dari 11,9 persen ke 3,3 persen dan dari 4,6 persen ke 2,4 persen. Lebih lanjut, dari tahun 2009 ke tahun 2010 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah terhempas tajam dari 15,7 persen ke hanya 0,3 persen saja, Pertumbuhan Investasi justru naik tajam dari 3,3 persen ke 8,5 persen, sementara Kesempatan Kerja hanya mengalami pertumbuhan sangat kecil yakni dari 2,4 persen ke 2,8 persen. Kondisi tidak searah ini dalam kurun waktu dari tahun 2001 hingga tahun 2014.

Tabel 1 di atas dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti di bawah ini.

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Kesempatan Kerja di Indonesia.

Pada Gambar 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Kesempatan Kerja hubungan kausalitasnya tidak searah dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur besarnya: (1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI); (2) Pengaruh

Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Investasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan di Kawasan Barat Indonesia (KBI); (3) Pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan di Kawasan Barat Indonesia (KBI); (4) Perbedaan pengaruh antar kedua wilayah pada 1, 2, dan 3.

2.KAJIAN PUSTAKA

2.1.Pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja

Faktor utama yang menentukan sebuah perekonomian mampu menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja adalah akumulasi modal yang akan melakirkkan berbagai proyek investasi yang selanjutnya akan menyediakan kesempatan kerja. Akan tetapi akumulasi modal hanyalah syarat perlu bagi terciptanya proyek proyek. Syarat cukupnya masih banyak, diantaranya situasi perekonomian yang kondusif supaya investor bergairah melakukan investasi (Wahyuningtyas,2010). Jika situasi perekonomian tidak kondusif misalnya sedang mengalami resesi, maka barang barang yang diproduksi tidak akan menemukan permintaan yang signifikan sehingga para investor enggan melakukan investasi meskipun kapitalnya tersedia. Sebagai akibatnya tidak akan banyak proses produksi yang akan menciptakan kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja (Hakim Abdul, 2002). Besar kecilnya minat atau kegairahan Investasi baik Penanaman Modal Asing(PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada suatu Negara sangat tergantung pada berbagai faktor. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi investasi di Indonsia (Nugroho, 2008) adalah: SDA, SDM, Stabilitas Politik dan Perekonomian, Stabilitas Kebijakan Pemerintah, Kemudahan dalam Perizinan, Inflasi, Etika Kerja dan Tenaga Kerja, Tingkat Kriminalitas, Regulasi valas, Akses ke Keuangan, Tarif Pajak, Regulasi Tenaga Kerja, Regulasi Perpajakan, Kondisi Infra Struktur, Tingkat keefisienan Birokrasi, suku bunga, faktor sosial budaya, dan lain lainnya.

Investasi dapat mempunyai multiplier effect yang besar (Risvi, 2009) karena investasi akan mendorong peningkatan

baik di sisi produksi maupun sisi konsumsi. Dengan peningkatan di kedua sisi tersebut akan menyebabkan terbentuknya pertumbuhan ekonomi. Multiplier effect dari investasi dapat dilihat dari sisi produksi yaitu produksi akan tergenjot karena investasi akan memberikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan produksi menjadi lebih baik. Selanjutnya, untuk berproduksi dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak sehingga akan mendorong pembukaan dan perluasan lapangan pekerjaan (Hendarmin, 2012). Berbagai pandangan ini sesuai dengan teori Lewis, teori Ranis-Fei dan teori Harrod Domar, bahkan teori Investasi itu sendiri yang berpengaruh langsung pada tiga hal; perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

2.2.Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja.

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Hakim Abdul ,2002) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Pemerintah dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Menurut Barro (2001) dan Sun'an (2008), kontribusi pengeluaran produktif akan berpengaruh positif terhadap Kesempatan Kerja, sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif akan berpengaruh negatif terhadap Kesempatan Kerja.

Sebagian dari Pengeluaran Pemerintah itu langsung diperuntukkan untuk pembukaan kesempatan kerja baru misalnya penerimaan Pegawai Negeri Sipil, Polisi dan Militer (Raharja, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Noah Karley (2000) di Benua Afrika pada tahun 2000 ditemukan pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja adalah positif dan signifikan. Penelitian lainnya yang senada dengan Noa adalah penelitian yang dilakukan oleh Cavallo (2005), Berument (2008), Hendarmin (2012).

Tetapi Mankiw, 2003 (dalam Suindyah, 2009) menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan pengeluaran pemerintah (ekspansi fiskal) maka akan menghambat investasi, yang pada gilirannya menurunkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Landau (dalam Suindyah, 2009) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang militer dan pendidikan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara untuk pendidikan sendiri berkorelasi kuat dan investasi pemerintah berkorelasi positif tetapi tidak signifikan. Sementara Lin (dalam Maipita, 2012) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil. Lin juga menyatakan bahwa Hukum Wagner hanya berlaku untuk negara maju.

2.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi

Pengeluaran Pemerintah dapat menarik masuk (Crowding In) atau mendesak keluar (Crowding Out) suatu Investasi, tergantung pada faktor faktor yang memengaruhinya (Risvi, 2009). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi (Liste, 2012) yaitu; Suku bunga, pendapatan nasional, kondisi sarana prasarana (infrastructure), birokrasi perizinan, kualitas sumber daya manusia,

peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan, stabilitas politik dan keamanan, sosial budaya.

Hal ini berarti Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi adalah dapat positif (Crowding In) dan dapat pula negatif (Crowding Out). Untuk pengaruh positif akibat dari peningkatan pengeluaran pemerintah maka menyebabkan akan diikuti dengan peningkatan investasi (PMDN dan PMA) dengan asumsi faktor faktor lain yang mempengaruhi variabilitas pengeluaran pemerintah adalah konstan (Liste, 2012). Salah satu tujuan dari peningkatan pengeluaran pemerintah (Hukum Wagner) adalah perbaikan berbagai infrastruktur Negara seperti jalan raya, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sehingga para Investor tertarik untuk menanamkan modalnya atau semakin meningkatkan penanaman modalnya (Crowding In). Sebaliknya, naiknya pengeluaran pemerintah disaat kurva LM sangat tidak elastis membuat para Investor mengurangi investasinya (Crowding Out).

Kasus di Indonesia adalah Crowding In, bukan Crowding Out, karena itu dapat ditafsirkan bahwa pengalokasian dana APBN dan APBD yang didalamnya termuat antara lain pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap peningkatan investasi. Beberapa penelitian empiris yang mendukung/sesuai dan bertentangan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2011) dan Sasana (2009), keduanya juga berpengaruh Crowding In. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ramey (2012) berpengaruh Crowding Out dan Ahmadi (2012) tidak signifikan dan tidak berpengaruh. Sejumlah penelitian yang antara lain meneliti pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi adalah Wahyuningtyas, Agustina Endah (2010), Petrus, Irene Lilian (2010), SEKI (2011) yang menemukan pengaruh positif (Crowding In) dan sejumlah penelitian yang menemukan pengaruh

negatif (Crowding Out) seperti penelitian yang dilakukan oleh Valerie A. Ramey dan NBER (2012).

3. KERANGKA KONSEPTUAL & HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diawali dengan menyatakan model fungsional yang

dipilih, dilanjutkan dengan menentukan bentuk fungsi nonlinier dan kemudian mengkonversi menjadi bentuk fungsi linier yang digunakan untuk menggambarkan kerangka konseptual. Adapun tahapan ini dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2
Bentuk Fungsional, Model Nonlinier dan transformasi Model Linier

Model Fungsional	Bentuk Fungsi Nonlinier	Bentuk Fungsi Linier
$Y_1 = f(X_1, X_2, X_3)$	$Y_1 = \alpha_0 X_1^{\alpha_1} e^{(\alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon_1)}$	$\ln Y_1 = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon_1$ $Y_1^* = \alpha_0^* + \alpha_1 X_1^* + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon_1$
$Y_2 = f(X_1, X_2, X_3, X_4, Y_1)$	$Y_2 = \beta_0 X_1^{\beta_1} Y_1^{\beta_5} e^{(\beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_2)}$	$\ln Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_5 \ln Y_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_2$ $Y_2^* = \beta_0^* + \beta_1 X_1^* + \beta_5 Y_1^* + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_2$
$X_3 = f(X_1, X_2)$	$e^{X_3} = X_1^{X_2}$	$X_3 = X_2 \ln X_1 = X_2 X_1^*$
$X_4 = f(X_2, Y_1)$	$e^{X_4} = Y_1^{X_2}$	$X_4 = X_2 \ln Y_1 = X_2 Y_1^*$

Sumber: Dijabarkan sendiri.

Berdasarkan Model Linier pada Tabel 2 dapat digambarkan kerangka konseptual seperti Gambar 2.

Keterangan Gambar 2

X_1 : Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure)
 X_2 : Variabel Dummy (Pembeda Intersep) KTI dengan KBI pada Investasi dan pada Kesempatan Kerja.
 X_3 : Variabel Kontrol (Pembeda Slope 1) KTI dengan KBI dari Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja.
 X_4 : Variabel Kontrol (Pembeda Slope 2) KTI dengan KBI dari Investasi terhadap Kesempatan Kerja.

Y_1 : Investasi
 Y_2 : Kesempatan Kerja
 $\alpha_0^* = \ln \alpha_0$ = Konstanta Intersep pada Y_1^*
 $\beta_0^* = \ln \beta_0$ = Konstanta Intersep pada Y_2^*
 ε_1 = Residual Y_1^*
 ε_2 = Residual Y_2^*

Pada gambar 3.1 semua garis hubungan kausalitas yang menuju ke Investasi menggunakan simbol α . Karena ada sebanyak 3 hubungan, maka koefisien α ada sebanyak 3 buah yaitu α_1 , α_2 dan α_3 . Sementara yang menuju ke Kesempatan Kerja menggunakan simbol β dan ada sebanyak 5 hubungan yakni koefisien β_1 sampai β_5 . Koefisien koefisien ini merupakan koefisien Slope, ditambah dengan konstanta Intersep α_0^* dan β_0^* serta factor residual (error) ε_1 dan ε_2 .

3.2. Hipotesis Penelitian

1. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi di KTI dan di KBI.
2. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja di KTI dan di KBI, baik secara langsung dan secara tidak langsung melalui Investasi maupun secara total.
3. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja di KTI dan di KBI.
4. Ada perbedaan pengaruh dan signifikan pada masing masing hipotesis 1, 2, dan 3 antara KBI dengan KTI.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi, Sumber dan Periode Data Penelitian

Penelitian ini meliputi 34 provinsi di Indonesia, 17 provinsi di Bagian Timur yakni 5 di Kalimantan, 6 di Sulawesi, 2 di Nusa Tenggara, 2 di Maluku, dan 2 di Papua. Sementara di Kawasan Barat Indonesia juga 17 provinsi yakni 1 di Bali, 6 di Jawa, 10 di Sumatera. Pembagian menjadi 2 Wilayah ini dimaksudkan untuk melihat Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap kedua wilayah ini yang diduga memiliki perbedaan yang berdampak pada mengalirnya tenaga kerja dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan mengalirnya tenaga

kerja Indonesia sebagai TKI ke luar negeri. Periode Tahun Penelitian adalah 7 tahun yaitu dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk mengeksekusi program statistik diperlukan paling sedikit 100 data untuk setiap variabel, sehingga dengan periode 7 tahun (data time series) dikali 33 Provinsi (data cross section) diperoleh jumlah data pooled (panel data) per variabel sebanyak 231 data, jauh diatas data minimal yang diperlukan. Jenis data adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sumber lainnya seperti Jurnal, Bulletin dan Artikel.

4.2. Metode Pengumpulan Data dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data setting alamiah, sumber data sekunder dan cara dokumentasi dengan tiga buah variabel Penelitian yakni Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Kesempatan Kerja ditambah sebuah variabel Dummy sebagai pembeda intersep serta dua buah variabel Kontrol sebagai pembeda Slope antara wilayah KTI dengan wilayah KBI.

4.3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Struktural Equation Modelling (SEM) dengan persamaan struktural model fungsional, bentuk fungsi linier hasil konversi seperti yang dinyatakan dalam Tabel 2 dan Gambar 2. Menggunakan panel data sekunder dari 34 provinsi di Indonesia selama 7 tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2013 (BPS, 2014). Selanjutnya untuk melakukan analisis data, persamaan bentuk linier dalam Tabel 2, X_3 dan X_4 harus disubstitusi ke dalam Y dan Y diperoleh persamaan persamaan seperti dalam Tabel 3.

Tabel 3 Persamaan persamaan secara umum, KTI, dan KBI

Untuk	Persamaan	Keterangan
Secara Umum (dlm X_2)	$Y_1^* = (\alpha_0^* + \alpha_2 X_2) + (\alpha_1 + \alpha_3 X_2) X_1 + \varepsilon_1$	
	$Y_2^* = (\beta_0^* + \beta_2 X_2) + (\beta_1 + \beta_3 X_2) X_1 + (\beta_5 + \beta_4 X_2) Y_1^* + \varepsilon_2$	
	$Y_2^* = [(\beta_0^* + \beta_2 X_2) + (\beta_5 + \beta_4 X_2)(\alpha_0^* + \alpha_2 X_2)] + [(\beta_1 + \beta_3 X_2) + (\beta_5 + \beta_4 X_2)(\alpha_1 + \alpha_3 X_2)] X_1 + [(\beta_5 + \beta_4 X_2)\varepsilon_1 + \varepsilon_2]$	Reduce Form
KTI ($X_2 = 1$)	$Y_1^* = (\alpha_0^* + \alpha_2) + (\alpha_1 + \alpha_3) X_1 + \varepsilon_1$	
	$Y_2^* = (\beta_0^* + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3) X_1 + (\beta_5 + \beta_4) Y_1^* + \varepsilon_2$	
	$Y_2^* = [(\beta_0^* + \beta_2) + (\beta_5 + \beta_4)(\alpha_0^* + \alpha_2)] + [(\beta_1 + \beta_3) + (\beta_5 + \beta_4)(\alpha_1 + \alpha_3)] X_1 + [(\beta_5 + \beta_4)\varepsilon_1 + \varepsilon_2]$	Reduce Form
KBI ($X_2 = 0$)	$Y_1^* = (\alpha_0^*) + (\alpha_1) X_1 + \varepsilon_1$	
	$Y_2^* = (\beta_0^*) + (\beta_1) X_1 + (\beta_5) Y_1^* + \varepsilon_2$	
	$Y_2^* = [(\beta_0^*) + (\beta_5)(\alpha_0^*)] + [(\beta_1) + (\beta_5)(\alpha_1)] X_1 + [(\beta_5)\varepsilon_1 + \varepsilon_2]$	Reduce Form

Sumber: Diturunkan dari Tabel 2

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh konstanta Intersep, koefisien Slope dan nilai residual seperti yang dinyatakan dalam Tabel 4.

Tabel 4 Intersep, Slope dan Residual (Error) secara umum, KTI, dan KBI

Untuk	Hubungan	Intersep	Slope	Residual
Secara Umum (dlm X_2)	$Y_1^* \leftarrow X_1^*$	$(\alpha_0^* + \alpha_2 X_2)$	$(\alpha_1 + \alpha_3 X_2)$	ε_1
	$Y_2^* \leftarrow Y_1^* \leftarrow X_1^*$	$(\beta_0^* + \beta_2 X_2)$	$(\beta_1 + \beta_3 X_2) \& (\beta_5 + \beta_4 X_2)$	ε_2
	$Y_{2T}^* \leftarrow X_{1T}^*$	$[(\beta_0^* + \beta_2 X_2) + (\beta_5 + \beta_4 X_2)(\alpha_0^* + \alpha_2 X_2)]$	$[(\beta_1 + \beta_3 X_2) + (\beta_5 + \beta_4 X_2)(\alpha_1 + \alpha_3 X_2)]$	$[(\beta_5 + \beta_4 X_2)\varepsilon_1 + \varepsilon_2]$
KTI ($X_2 = 1$)	$Y_1^* \leftarrow X_1^*$	$(\alpha_0^* + \alpha_2)$	$(\alpha_1 + \alpha_3)$	ε_1
	$Y_2^* \leftarrow Y_1^* \leftarrow X_1^*$	$(\beta_0^* + \beta_2)$	$(\beta_1 + \beta_3) \& (\beta_5 + \beta_4)$	ε_2
	$Y_{2T}^* \leftarrow X_{1T}^*$	$[(\beta_0^* + \beta_2) + (\beta_5 + \beta_4)(\alpha_0^* + \alpha_2)]$	$[(\beta_1 + \beta_3) + (\beta_5 + \beta_4)(\alpha_1 + \alpha_3)]$	$[(\beta_5 + \beta_4)\varepsilon_1 + \varepsilon_2]$
KBI ($X_2 = 0$)	$Y_1^* \leftarrow X_1^*$	(α_0^*)	(α_1)	ε_1
	$Y_2^* \leftarrow Y_1^* \leftarrow X_1^*$	(β_0^*)	$(\beta_1) \& (\beta_5)$	ε_2
	$Y_{2T}^* \leftarrow X_{1T}^*$	$[(\beta_0^*) + (\beta_5)(\alpha_0^*)]$	$[(\beta_1) + (\beta_5)(\alpha_1)]$	$[(\beta_5)\varepsilon_1 + \varepsilon_2]$

Sumber: Tabel 3.

Selanjutnya, pengaruh langsung dan tidak langsung serta pengaruh total dapat digambarkan seperti gambar 3 dan Tabel 5.

Gambar 3 Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total antar Variabel
Tabel 5 Tabel hubungan dari Gambar 3

Pengaruh		Umum	KBI ($X_2 = 0$)	KTI ($X_2 = 1$)	Δ
Langsung	PP→KK	$(\beta_1 + \beta_3 X_2)$	β_1	$(\beta_1 + \beta_3)$	β_3
	PP→INV	$(\alpha_1 + \alpha_3 X_2)$	α_1	$(\alpha_1 + \alpha_3)$	α_3
	INV→KK	$(\beta_5 + \beta_4 X_2)$	β_5	$(\beta_5 + \beta_4)$	β_4
Tidak Langsung	PP→INV→KK	$(\alpha_1 + \alpha_3 X_2)(\beta_5 + \beta_4 X_2)$	$(\alpha_1)(\beta_5)$	$(\alpha_1 + \alpha_3)(\beta_5 + \beta_4)$	$(\alpha_1 + \alpha_3)(\beta_4)$
Total	PP→KK	$[(\beta_1 + \beta_3 X_2) + (\beta_5 + \beta_4 X_2)(\alpha_1 + \alpha_3 X_2)]$	$[(\beta_1) + (\beta_5)(\alpha_1)]$	$[(\beta_1 + \beta_3) + (\beta_5 + \beta_4)(\alpha_1 + \alpha_3)]$	$[(\beta_1 + \beta_5 \alpha_3) + (\beta_4)(\alpha_1 + \alpha_3)]$

Sumber: Tabulasi dari Gambar 3

5. HASIL

Olah data menggunakan AMOS V21 dan hasilnya adalah seperti Gambar 4.

Gambar 4 Hasil Penelitian.

Sumber: Hasil Olah data dengan AMOS V21

Tabel 6 Hasil Estimasi Parameter Hubungan antar Variable

Variabel		Estimasi Parameter					
Endogen	Eksogen	Simbol	Nilai	S.E	C.R	P	Sig, $\alpha(5\%)$
Investasi (Y_1^*)	Pengeluaran Pemerintah (X_1^*)	α_1	2,31	0,134	17,218	***	Sig
	Dummy (X_2)	α_2	30,535	0,265	115,25 2	***	Sig
	Kontrol (X_3)	α_3	-1,064	0,009	- 117,35 0	***	Sig
Kesempatan Kerja (Y_2^*)	Pengeluaran Pemerintah (X_1^*)	β_1		0,070	2,335	0,02 0	Sig
	Dummy (X_2)	β_2	0,163	0,696	-12,803	***	Sig
	Kontrol1 (X_3)	β_3	-8,911	0,024	8,006	***	Sig
	Kontrol2 (X_4)	β_4	0,194	0,003	43,521	***	Sig
	Investasi (Y_1^*)	β_5	0,138	0,023	3,771	***	Sig
			0,085			***	

Sumber: Hasil Olah Data dengan AMOS V21.

6. PEMBAHASAN HASIL

6.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi di KBI dan di KTI.

Berdasarkan Gambar 4 dan Tabel 6 tampak bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi di KBI adalah 2,31 dan signifikan, sedangkan di KTI adalah 1,25 dan signifikan. Artinya jika Pengeluaran Pemerintah dinaikkan sebesar 1 persen, maka akan diikuti dengan kenaikan Investasi (PMA dan PMDN) sebesar 2,31 persen di KBI dan 1,25 persen di KTI. Hal ini sesuai dengan teori Crowding In dimana salah satu tujuan dari peningkatan pengeluaran pemerintah (Hukum Wagner) adalah perbaikan berbagai infrastruktur Negara seperti fasilitas transportasi, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sehingga para

Investor tertarik untuk menanamkan modalnya atau semakin meningkatkan penanaman modalnya.

6.2. Pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja di KBI dan di KTI.

Pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja di KBI adalah 0,09 dan signifikan, sedangkan di KTI adalah 0,23 dan signifikan. Artinya jika Investasi dinaikkan sebesar 1 persen pada kedua kawasan, maka akan diikuti dengan kenaikan Kesempatan Kerja sebesar 0,09 persen di KBI dan 0,23 persen di KTI. Hal ini sesuai dengan beberapa teori antara lain teori Lewis, teori Ranis-Fei dan teori Harrod-Domar tentang peningkatan Investasi akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja.

6.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja di KBI dan di KTI.

Pengaruh Langsung

Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja di KBI adalah 0,16 dan signifikan, sedangkan di KTI adalah 0,35 dan signifikan. Artinya jika Pengeluaran Pemerintah dinaikkan sebesar 1 persen, maka akan diikuti dengan kenaikan Kesempatan Kerja sebesar 0,16 persen di KBI dan 0,35 persen di KTI. Hal ini sesuai dengan teori dimana salah satu tujuan dari peningkatan pengeluaran pemerintah (teori Keynes) adalah mengatasi pengangguran atau meningkatkan kesempatan kerja antara lain penerimaan PNS, Polisi, Militer dan mendorong kesempatan kerja di swasta.

Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah melalui Investasi terhadap Kesempatan Kerja di KBI adalah 0,21 ($2,31 \times 0,09$) dan signifikan, sedangkan di KTI adalah 0,29 ($1,25 \times 0,23$) dan signifikan. Artinya jika Pengeluaran Pemerintah dinaikkan sebesar 1 persen, maka akan diikuti dengan kenaikan Kesempatan Kerja sebesar 0,21 persen di KBI dan 0,29 persen di KTI. Hal ini sesuai dengan gabungan teori Crowding In dan teori Lewis, Ranis-Fei, dan teori Harrod-Domar.

Pengaruh Total

Pengaruh Total Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja di KBI adalah 0,37 ($0,16 + 0,21$) dan signifikan, sedangkan di KTI adalah 0,64 ($0,35 + 0,29$) dan signifikan. Artinya jika Pengeluaran Pemerintah dinaikkan sebesar 1 persen, maka akan diikuti dengan kenaikan Kesempatan Kerja sebesar 0,37 persen di KBI dan 0,64 persen di KTI. Hal ini sesuai dengan bahwa salah satu tujuan dari peningkatan pengeluaran pemerintah adalah mengatasi pengangguran.

Perbedaan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di KBI dengan di KTI.

Perbedaan Pengaruh Langsung

Adapun perbedaan pengaruh langsung di KBI dengan di KTI; pengeluaran pemerintah terhadap investasi adalah -1,06 artinya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi lebih besar di KBI daripada di KTI. Sementara perbedaan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja adalah 0,19 artinya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja lebih kecil di KBI daripada di KTI. Sedangkan perbedaan pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja adalah 0,14, artinya pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja lebih kecil di KBI.

Perbedaan Pengaruh Tidak langsung

Perbedaan Pengaruh Tidak langsung di KBI dengan di KTI adalah 0,08 artinya pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja melalui Investasi di KBI lebih kecil daripada di KTI.

Perbedaan Pengaruh Total

Perbedaan Pengaruh Total di KBI dengan di KTI adalah 0,27 artinya pengaruh Pengeluaran Pemerintah secara total terhadap Kesempatan Kerja di KBI lebih kecil daripada di KTI.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil, baik pengaruh langsung dan tidak langsung maupun pengaruh total hipotesis 1, 2, dan 3 semua terpenuhi. Adapun perbedaan pada hipotesis 4 ternyata hanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi yang lebih besar di KBI daripada di KTI,

yang lainnya yakni pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja (langsung, tidak langsung, dan total) semuanya lebih besar di KTI daripada di KBI dengan perbedaan pengaruh sekitar dua kali lipat. Hal ini memberi pesan bahwa untuk pengeluaran pemerintah dengan porsi persentase yang sama, para investor lebih tertarik menanamkan modalnya di KBI daripada di KTI. Namun pengaruhnya terhadap kesempatan kerja, KTI lebih bergantung pada besarnya pengeluaran pemerintah daripada KBI. Atau dengan perkataan lain KBI lebih mandiri/lebih mapan daripada KTI.

Karena itu disarankan kepada pengambil kebijakan untuk lebih memperbesar porsi persentase pengeluaran pemerintah yang dialokasikan di KTI agar para investor beralih perhatian ke kawasan ini sehingga pengaruhnya yang saat ini lebih besar secara berangsur angsur menciptakan kemandirian/kemampuan di KTI yakni kawasan yang memang tertinggal dalam pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi et al. 2012. Uncertainty and Private Investment: Evidence from Iran. *Journal of International Economics* 12.
- Baotai Wang. 2003. The Long-run Effects of Government Expenditure on Private Investment in Canada: An Empirical Investigation. *European Journal of Economic and Political Studies*, Ejepe-1(1), 2003.
- Barro, Robert J. 2001. Human Capital and Growth, *The American Economic Review*, Vol. 91, No.2.
- Berument, Hakan. Dogan, Nukhet and Tansel, Aysit. 2008. Macroeconomic Policy and Unemployment by Economic Activity: Evidence from Turkey. *Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for The Study of Labor*. Discussion Paper No. 3461. April 2008.
- BNP2TKI, 2013. Upah di 10 Negara Program Kerjasama G to G <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8512-bnp2tki-lepas-383-tki-formal-ke-9-negara-dan-eropa.html> diakses pada tanggal 12 Des 2013.
- Braga, Breno. Guillen, Diego and Thomson, Ben. 2013. Local Government Spending and the Labor-Market Multiplier: Evidence from Brazil. *Department of Economics, University of Michigan*, October 29, 2013.
- Cavallo, Michele. 2005. Government Employment Expenditure and the Effects of Fiscal Policy Shocks. *Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series*, September 2005.
- Hakim, Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan (Cetakan Kedua)*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Harijono, Gatot Setio. 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (Online)* Vol. 10, No. 1, 2010, ISSN 1411 6081.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di

- Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal UNTAN, Vol. 8, No. 3, Oktober 2012.
- Karley, Noa. 2000. Government Investment, Growth and Employment in South Africa. *Journal of Social Development in Africa* (2000), 15, 1.
- Kiswanto Mohammad, 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Keberpihakan Pembangunan (KP) melalui Investasi, Mutu Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. Disertasi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Lin, 1994. Government Spending and Economic Growth. *The Journal of Economic Analysis*. Ahmadu Bello University. Year 1994, Vol. I, Issue II.
- Liste, Janvier. Kolster, Jacob and Fundani, Nono Matondo. 2012. Chines Investments and Employment Creation in Algeria and Egypt. *African Development Bank (AfDB). Economic Brief*. 2012.
- Mankiw, Gregory N. 2007. *Principles of Economics*. 3rd Edition. Cengage Learning Asia Pte Ltd.
- Mapita, Indra. 2012. Simulasi Pengeluaran Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kinerja Ekonomi Makro: Suatu Model Computable General Equilibrium. *QE Journal*, Vol. 01, no.02-1
- Nugroho. 2008. Evaluasi terhadap Faktor factor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya. *Jurnal Riptek*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2008.
- Olney, William W. 2013. A Race to The Bottom? Employment Protection and Foreign Direct Investment. *Journal of International Economics* 91 (2013).
- Portal Nasional RI, 2012. Penempatan TKI Keluar Negeri.
- <http://www.indonesia.go.id/en/ministries/minitres/ministry-of-manpower-and-transmigration/497-ketenagakerjaan/12244-muhaimin-penempatan-tki-sektor-formal-meningkat-jadi-52-%-tahun-2012> diakses pada tanggal 12 Des 2013
- Prasetyia, Ferry .2011. Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Kontitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 5, No. 2 Oktober 2011.
- Rahardja Prathama, Manurung Mandala. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* Edisi Ketiga. Jakarta: LP–FEUI.
- Ramey, Valerie A. 2012. *Government Spending and Private Activity*. University of California, San Diego and NBER. Januari 2012.
- Richard, , Froyen T. 2002. *Macroeconomics Theories And Policies (Seventh Edition)*. USA: Prentice Hall.
- Rizvi, Syed Zia Abbas and Nishat, Mohammad. 2009. *The Impact of Foreign Direct Investment on Employment Opportunities: Panel Data Analysis: Empirical Evidence from Pakistan, India and China*. Institute of Business Management (IoBM), Karachi. Revised: December 10. 2009.

- Sasana, Hadi. 2008. Analisis Faktor Factor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Perpajakan (Jejak) UNNES , Vol.1, No.1, September, 2008.
- Sodik Jamzani dan Nuryadin Didi.2004. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang.
- Suindyah D, Sayeti. 2009. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Jombang: Ekuitas Universitas Darul 'Ulum
- Sun'an Muammil & Astuti Endang. 2008. Analisis Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Iqtishodunia, Vol. 1. No.1, Februari 2007.
- Todaro, M.P., Smith S. C, 2006. Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan). (Drs. Haris Munandar, MA dan Puji A.L., SE, Pentj). Jakarta : rd PT. Gelora Aksara Pratama.
- Wahyuningtyas, Agustina Endah, 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran terhadap Investasi di Indonesia. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Walterskirchen, Ewald, 1999. The Relationship between Growth, Employment and Unemployment in the EU; European Economist for an Alternative Economic Policy (tsernetwork), Workshop in

Barcelona, September 1999.